

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (P)



**REKONSTRUKSI MODEL APLIKATIF KEWENANGAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM TATA KELOLA KONFLIK BERAGAMA PASCA-
PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

Ketua : Lutfi Effendi, SH. M.Hum.
NIDN. 0010086004
Anggota 1 : Agus Yulianto, SH. MH.
NIDN. 0017075905
Anggota 2 : Muhammad Dahlan, SH. MH.
NIDN. 0006098005

Dibiayai oleh:
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Melalui DIPA Universitas Brawijaya
Nomor: DIPA-023.04.2.414989/2013, Tanggal 5 Desember 2012, dan berdasarkan SK
Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 407/SK/2013 tanggal 2 September 2013

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DESEMBER 2013

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : REKONSTRUKSI MODEL APLIKATIF KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM TATA KELOLA KONFLIK BERAGAMA PASCA-PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

Kode/Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum
Bidang Unggulan : Good Governance

Ketua Peneliti,
a. Nama Lengkap : Lutfi Effendi, SH. M.Hum.
b. NIDN : 0010086004
c. Jabatan Fungsional : Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara
d. Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
e. Nomor HP. : 082143134437
f. Alamat Email : lutfi.effendi@ub.ac.id

Peneliti (1),
a. Nama Lengkap : Agus Yulianto, SH. MH.
b. NIDN : 0017075905
c. Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya

Peneliti (2),
a. Nama Lengkap : Muhammad Dahlan, SH. MH.
b. NIDN : 0006098005
c. Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya

Lama Penelitian
Keseluruhan : 2 (Dua) Tahun
Penelitian Tahun Ke- : 1 (Satu)
Biaya Penelitian
Keseluruhan : Rp. 105.000.000,-
Biaya Tahun Berjalan : Disetujui Rp. 50.000.000,-



Shahabudin, SH. MH.
NIP/NIK. 19591216 198503 1 001

Malang, 20 Desember 2013
Ketua Peneliti,

Lutfi Effendi, SH. M.Hum.
NIP/NIK. 19600810 198601 1 002



Menyetujui,
LPPM UB

Prof. Dr. H. Saiful Chuzsemi, MS
NIP/NIK. 19520514 198002 2 001

**REKONSTRUKSI MODEL APLIKATIF KEWENANGAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM TATA KELOLA KONFLIK BERAGAMA PASCA-
PENGESEAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

Abstrak

Pemerintah daerah saat ini telah menjadi tumpuan utama dalam penanganan konflik beragama semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Di tengah maraknya konflik sosial yang terjadi di tingkat daerah, dibutuhkan undang-undang tersebut menjadi problem hukum sendiri dalam perspektif visibilitas dan efektifitasnya. Semenjak diterapkannya otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, telah juga dilahirkan berbagai aturan menyangkut pengaturan pembagian dan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Transformasi kewenangan tersebut menjadi menarik untuk diamati dalam kerangka penanganan konflik beragama di daerah. Pendekatan kewenangan meskipun mempunyai kecenderungan kekakuan dalam menghadapi konflik, akan tetapi penanganan konflik justru mustahil dilakukan tanpa adanya legitimasi kekuasaan di tingkat daerah. Penelitian ini akan mencoba merekonstruksi model kewenangan yang saat ini telah bertransformasi dalam rangka memberikan alternatif solusi dalam penanganan konflik beragama yang selain berkeadilan, berkelanjutan, dan damai juga terjamin efektifitas dan kepastiannya.

Keywords: Kewenangan, Konflik, Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Jurnal:

- Abdullah. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Pencatatan Perkawinan Kong Hu Cu Oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya*. Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No.178/KTUN/1997. Tesis. Semarang (Program Pasca Sarjana, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang), 2007.
- As'ad, Muhammad. *Ahmadiyah and the Freedom of Religion in Indonesia*. Journal of Indonesian Islam, Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, Volume 03, No.02, Desember, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta (Sinar Grafika). 2009.
- Bielefeldt, Heiner. *Freedom of Religion or Belief-A Human Right under Pressure*. Oxford Journal of Law and Religion, doi: 10.1093/ojlr/rwr018, 2012.
- Busro, Achmad. *Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Hukum pada Era Globalisasi yang Multidimensional*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, No.3 Volume 37 Tahun 2008.
- Danchin, Peter G. *The Emergence and Structure of Religious Freedom in International Law*. Journal of Law and Religion, Volume 23 No.2, 2007/2008.
- *Who is the "Human" in Human Rights? The Claims of Culture and Religion*. Maryland Journal of International Law, Volume 24 No.99, 2009.
- Dwi, Agnes. *Solidaritas Bagi Kebebasan Beragama*. Jurnal Maarif, Maarif Institute Jakarta, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2010.
- Evans, Malcolm. *Advancing Freedom of Religion or Belief: Agendas for Change*. Oxford Journal of Law and Religion, doi: 10.1093/ojlr/rwr002, 2011.
- Grim, Brian J. *Religious Freedom and Social Well-being: A Critical Appraisal*. International Journal for Religious Freedom, Volume 2, Issue 1, 2009.
- Hajiannor. *Pluralisme Agama dalam Perspektif Filsafat Perennial*. Jurnal Ittihad Kopertis Wilayah XI Kalimantan, Volume 8 No.13, April, 2010.
- Hasibuan, Albert. *Politik Hak Asasi Manusia (HAM) dan UUD 1945*. Jurnal Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta, Volume VIII, No.1, Juli 2008.
- Hamid S. Anamimi Dan Maria Farida Indrati Soeprpto, *Ilmu Perundang-undangan, dan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998

- Hudaeri, Mohamad. *Islam dan Hak Asasi Manusia: Respon Intelektual Muslim*. Jurnal Al-Qalam PPPM IAIN Sultan Maulana Hasanudin Nomor 3 Volume 24 Tahun 2007.
- Krispurwana, Telesphorus. *Dialog Antaragama dan Tantangan bagi Perdamaian serta Keadilan*. Jurnal Diskursus Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya Jakarta, Volume 6 No. 1 April 2007.
- Lubis, Todung Mulya. *Menegakkan Hak Asasi Manusia, Menggugat Diskriminasi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun Ke-39, Nomor 1, 2009.
- Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, Setara Press, Malang, 2012
- Margiyono, et al. *Bukan Jalan Tengah, Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*. Jakarta (ILRC), 2011.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan Jilid 2 (Proses Dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)*, Kanisius Yogyakarta, 2007.
- Ridwan al-Makassary & Chaidar S. Bamualim. *Dilema Aplikasi Syari'ah, Sekularisme dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jurnal Hukum Republica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2003.
- Risse, Thomas, et al (editor). *The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change*. Cambridge (Cambridge University Press) 2005.
- Wijaningsih, Dyah. *Perubahan Sosial dan Hukum (Dalam Ancangan dan Pemikiran)*. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Volume 14, No.1, Januari 2004.
- Winata, Frans Hendra. *Agama Tidak Memerlukan Pengakuan Negara Secara Resmi dan Diatur Hukum*. Jurnal Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta, Volume VIII No.1 Juli, 2008.

Sumber lain:

- Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/TAHUN 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia Tahun 2008 Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Diterbitkan Pada Desember 2008

Laporan Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2007-2010. Setara Institute Jakarta. Di akses dalam website: <http://www.setara-institute.org/en/content/grafik-laporan-pelanggaran-kebebasan-beragamaberkeyakinan-2007-2010> sebagaimana diakses pada tanggal 25 Juni 2011

Setara Institute Jakarta: Laporan Tahunan 2010: *Negara Menyangkal: Kondisi Kebebasan Beragama/berkeyakinan di Indonesia 2010*. Jakarta (Pustaka Masyarakat Setara) 2010

The Wahid Institute Jakarta: *Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi 2010*.

<http://www.globalmuslim.web.id/2011/06/sila-ketuhanan-yang-maha-esa-bermakna.html> di akses pada 20 Juni 2010

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;
- Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 52 Prp Tahun 1960;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi;
- Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang terkait dengan Pemerintah Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.